

TESIS

FRAGMENTASI KEKUATAN POLITIK ISLAM
ORGANISASI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA PADA
PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR

FRAGMENTATION OF THE ISLAMIC POWER OF MUHAMMADIYAH
AND NAHDLATUL ULAMA ORGANIZATIONS PRESIDENTIAL
ELECTION 2019 IN THE CITY OF MAKASSAR

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2
Program Studi Ilmu Politik



OLEH:
ST. HARDIANTY ZAINUDDIN
E052172003

PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

TESIS

FRAGMENTASI KEKUATAN POLITIK ISLAM MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA PADA PILPRES 2019
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh
ST. HARDIANTY ZAINUDDIN
Nomor Pokok E052172003

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **31 Agustus 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat



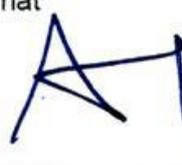
Prof. Dr. M. Basir Syam, M.Ag.

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



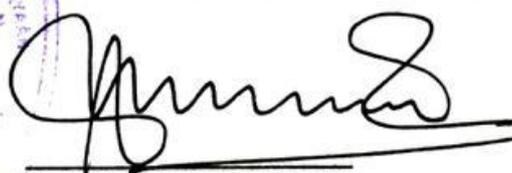
Dr. Ariana, S.IP., M.Si.



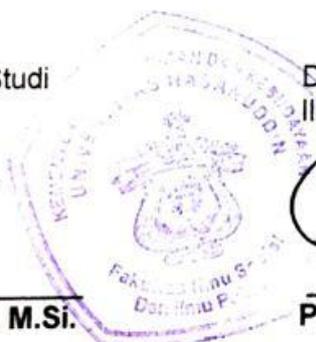
Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St. Hardianty Zainuddin

Nomor Pokok Mahasiswa : E052172003

Program Studi : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Oktober 2020

Yang Menyatakan



St. Hardianty Zainuddin

ABSTRAK

ST. HARDIANTY ZAINUDDIN. *Pragmentasi Kekuatan Politik Islam Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pada Pilpres 2019* (dibimbing oleh Basir Syam dan Sukri).

Penelitian ini bertujuan mengkaji preferensi politik yang ditunjukkan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU pada pilpres 2019, serta mengetahui kontribusi yang diberikan oleh kedua organisasi terhadap pelaksanaan pilpres 2019.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode snowball sampling. Data dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai organisasi dan juga sebagai kelompok kepentingan, preferensi politik organisasi Muhammadiyah dan NU dapat diidentifikasi berdasarkan motif politik yang dimiliki, yaitu motif materi, motif solidaritas, dan motif idealisme, serta kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU pada pilpres 2019 yaitu kontribusi berupa nilai atau norma yang dikeluarkan oleh organisasi sebagai pedoman bagi para kader sehingga mampu berpolitik dengan didasari etika. Selain itu, kontribusi lainnya yang diberikan yaitu keikutsertaan elit organisasi dan pemberian dukungan yang diberikan kepada masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2019. Dengan adanya kontribusi dukungan yang ditujukan kepada pasangan calon tersebut mengakibatkan netralitas organisasi Muhammadiyah dan NU menjadi hilang di mata masyarakat.

Kata kunci: Kekuatan Politik Islam. Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama.
Pilpres 2019



ABSTRACT

ST. HARDIANTY ZAINUDDIN. *Fragmentation of The Islamic Power of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama Organizations in The 2019 Presidential Election* (Supervised by **Basir** and **Sukri**).

The study aims to examine the political preferences requested by the Muhammadiyah and NU organizations at the 2019 presidential election and to know what contributions of both organizations for the election.

The type of research used in this study was qualitative using a descriptive approach. The data obtained were based on collection from interviews and documentations. Determination of informant used the snowball sampling method. The data obtained were analyzed using three stages namely: data reduction, data presentation and verification, and making conclusion.

The results of this study indicate that as an organization and also as an interest group, the political preferences of the Muhammadiyah and NU organizations can be identified based on their political motives, namely material motives, solidarity motives, and idealism motives. Also the contributions made by Muhammadiyah and NU in the 2019 presidential election are contributions in the form of values or norms issued by the organization as a guideline for cadres so that they are able to do politics based on ethics. In addition, other contributions made, include the participation of the elite in the organization and the support given to each pair of presidential and vice presidential candidates in the 2019 presidential election. With the contribution of support aimed at the candidate pair, the neutrality of the Muhammadiyah and NU organization will disappear in the eyes of public.

Keywords: Political power of Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, 2019 Presidential Election



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpahruhan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul yang penulis ajukan yaitu Fragmentasi Kekuatan Politik Islam Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pada Pilpres 2019 di Kota Makassar.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini banyak hambatan yang penulis hadapi dan sempat kehilangan semangat, namun berkat bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, Alhamdulillah dapat terselesaikan meskipun masih memiliki banyak kekurangan. Secara pribadi saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr Dwia Aries Tina Pubuluhu, MA., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
3. Bapak Dr. Suparman, M.Si dan Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si Selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

4. Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Prof. Dr. Basir, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing I
6. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing II
7. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Selaku Penguji
8. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Selaku Penguji
9. Bapak Drs. A Yakub, M.Si., Ph.D., Selaku Penguji
10. Bapak, Ibu Dosen beserta seluruh staff akademik yang turut membantu
dalam proses administratif mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik.
11. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Drs. Zainuddin Ompo, M.Pd., dan Ibu
Dra. Nagawati dan saudara-saudara saya Syamsul Alam Zainuddin dan
Bella Fatimah Nabila; Hasrul Azwar Zainuddin dan Noviana Djunaid,
Ibnu Munzir Zainuddin yang telah memberikan bantuan baik moril dan
materil.
12. Kepada teman-teman, Ibnu Khaldun, Ananda Resky Wibowo, Nurtakwa,
Miftahul Khiyarah yang turut andi memberikan bantuan pemikiran,
semangat dan dorongan dalam proses penulisan tesis serta arahan-arahan
yang diberikan oleh Kak Nadia Indriana Tenriawaru selaku senior yang
lebih berpengalaman dalam proses penyusunan tugas akhir.
13. Kepada Rany Caesar Astuty dan Putri Resky Indria yang memiliki peran
besar dari awal penulis berkuliah hingga dapat menyelesaikan segala
prosesnya.

Semoga segala bantuan yang diberikan mampu menjadi amal sholeh dan senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Sehingga pada akhirnya tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi kita semua. Terima Kasih.

Makassar, 28 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1-8
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9-23
2.1 Konsep Kekuatan Politik	9
2.2 Kelompok Kepentingan.....	11
2.3 Penelitian yang Relevan	15
2.4 Kerangka Konseptual	18
2.5 Definisi Operasional.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24-28
3.1 Lokasi Penelitian.....	24
3.2 Jenis Penelitian	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26

3.4 Jenis Data.....	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	29-59
4.1 Muhammadiyah	29
4.2 NU.....	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	60-110
5.1. Preferensi Politik Muhammadiyah dan NU	60
5.2. Kontribusi Muhammadiyah dan NU pada Pilpres 2019	79
5.3. Implikasi Teori.....	103
5.4. Implikasi Empiris.....	108
BAB VI PENUTUP	111-113
6.1 Kesimpulan.....	111
6.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.171

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya dikotomi antara kelompok Nasionalis dan Islam dalam dunia perpolitikan di Indonesia secara tidak sengaja menempatkan Islam sebagai kekuatan politik yang cukup signifikan. Dalam sejarahnya, kekuatan politik Islam telah muncul pada masa kerajaan Hindu-Budha hingga kesultanan Islam dan sempat mengalami kemunduran sejak kedatangan kolonialisme terutama saat penjajahan Belanda. Namun, hal tersebut tidak serta merta menyurutkan Islam politik berkembang di Nusantara. Sejak Indonesia merdeka hingga berganti dari masa ke masa yaitu orde lama, orde baru, dan reformasi bahkan hingga kini, Islam politik tetap menjadi barometer kekuatan politik di Indonesia.

Kekuatan politik Islam begitu besar pengaruhnya dalam kontestasi politik di Indonesia, seperti yang terjadi pada pemilihan presiden 2019. Dalam pemilihan tersebut dipertemukannya dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki massa yang begitu besar. Namun dalam pilpres 2019, kedua organisasi ini seakan tidak sejalan dalam menentukan pilihan mereka.

Terfragmentasinya kekuatan politik di pilpres 2019, antara Muhammadiyah dan NU mempunyai interpretasi sesuai dengan persepsi masing-masing kader organisasi terhadap kedua pasangan calon yaitu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Tidak adanya ketegasan yang diberikan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU terkait pilihan politik di pilpres menjadi dasar para kader

menggunakan pilihan rasional untuk menentukan sikap politik mereka. Meskipun begitu, basis utama organisasi yang telah berorientasi pada pasangan calon tertentu mampu menjadi penggerak dalam memobilisasi massa sehingga memiliki orientasi yang sama antar kader organisasi.

Basis organisasi Muhammadiyah dan NU mampu mempengaruhi preferensi pemilih. Tidak dapat dinafikan jika preferensi memilih seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka berada. Lingkungan ini menjadi sebuah variable yang mampu menciptakan struktur kognisi seseorang yang nantinya akan direspon dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, lingkungan seseorang dalam melakukan interaksi akan menjadi faktor utama dalam memahami kecenderungan politik yang dimiliki oleh seseorang.

Variable lingkungan akan menjadi salah satu hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam mengartikan arah politik individu. Hal ini juga berlaku pada para kader organisasi Muhammadiyah dan NU, sehingga preferensi politik mereka dapat terlihat.

NU dan Muhammadiyah memang tidak terlibat secara formal didalam politik praktis yang dijalankan sebagai bagian dari proses demokrasi Indonesia. Namun didalam perjalanan kedua organisasi ini tidak terlepas dari pengaruh dan tarikan politik. Jika dikaitkan dengan Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 lalu, NU dan Muhammadiyah juga memiliki pengaruh yang sangat besar ditengah isu-isu yang beredar pada pra dan pasca pilpres. Adanya isu ketidaknetralan yang diterima oleh NU dan Muhammadiyah dengan melihat fakta yang diungkapkan oleh berbagai lembaga survei di Indonesia seperti hasil survei yang dilakukan oleh

Lembaga Survei Median berdasarkan survei nasional menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dalam pemilih kalangan NU, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul di pemilih Muhammadiyah.¹ Hal yang sama juga didapatkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan hasil survey pada tanggal 18-25 Februari 2019, sebesar 64,1% NU dipastikan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, dan angkanya diprediksikan akan terus meningkat. Sementara itu, pemilih dari Muhammadiyah kepada Jokowi pada Februari 2019 sebesar 33,3%, turun cukup drastis dari 42% pada Januari 2019.²

Kenetralan NU juga dipertanyakan dengan melihat dinamika yang terjadi pada saat pencalonan capres dan cawapres. Misalnya saja, saat menjelang hari terakhir pencalonan, santer dibicarakan bahwa yang akan mendampingi Joko Widodo sebagai salah satu calon presiden Republik Indonesia adalah Mahfud MD. Namun terdapat isu bahwa yang harus menjadi calon wakil presiden saat itu haruslah orang yang berasal dari PBNU. Terdapat dua nama kader NU yang sering disebut-sebut akan mendampingi petahana Joko Widodo, yaitu Muhaemin Iskandar dan KH. Ma'ruf Amin. Akan tetapi yang terpilih menjadi calon wakil presiden yaitu Ma'ruf Amin yang merupakan *Rais Aam* NU pada saat itu. Muhammadiyah juga tidak terlepas dari isu ketidaknetralan tersebut, dengan melihat beberapa elit dari organisasi tersebut yang terang terangan mendukung salah satu paslon presiden dan wakil presiden saat itu, salah satunya ialah Amin Rais yang merupakan mantan ketua PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah. Amin

¹Zunita Amalia Putri, Survei Median: Jokowi Unggul di Kalangan NU, Prabowo di Muhammadiyah. *news.detik.com*, diakses pada 27 Juli 2019 pukul 16:10 WITA.

²Fransiskus Adhiyuda, Survei LSI: Jokowi-Ma'ruf Unggul NU, Prabowo-Sandi Unggul Muhammadiyah, PA212 dan FPI. *Tribunnews.com* diakses pada 17 Juli 2019, pukul 16:45 WITA.

Rais yang mendesak ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir untuk memberikan dukungan politik dalam pilpres 2019.

Ketidaknetralan NU dan Muhammadiyah menjadi salah satu hal yang sering dibicarakan. Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin yang diidentikkan dengan PBNU, sedangkan Prabowo-Sandi dengan Muhammadiyah. Namun hal ini ditepis oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang mengatakan, pihaknya maupun PBNU secara organisasi tidak ada dalam upaya mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.³ Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin yang diidentikkan dengan PBNU didasari dengan melihat posisi KH Ma'ruf Amin sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).⁴

Meskipun ada statement dari ketua Muhammadiyah yang mengatakan pihaknya berada dalam posisi netral namun berbeda jika di bandingkan dengan realitas di lapangan. Baik Muhammadiyah maupun NU terasosiasi berada di garis politik yang berbeda, asumsi ini berdasarkan kacamata sosial dari arus kekuatan-kekuatan dukungan yang tampak. Di pahami bahwa, dalam sudut pandang masyarakat jangkauan politik kedua organisasi keagamaan ini diletakan pada dua partai besar yang perannya dapat di bilang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan oleh kiai-kiai dari NU, sedang Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh mantan ketua umum dari Muhammadiyah, alur integrasi dari kedua partai dan lembaga keagamaan ini mempunyai peran yang terbilang vital dalam pertautan politik

³Putu Merta Surya Putra, Haedar Nasir: Muhammadiyah dan PBNU Netral di Pilpres 2019. *Liputan6.com*, diakses pada 20 Juli 2019, pukul 12:14 WITA.

⁴Komitmen Kiai Ma'ruf Amin Usai Ditetapkan Jadi Wakil Presiden RI, *nu.or.id* diakses pada 20 Juli 2019, pukul 12:20 WITA.

nasional. Sama halnya dengan arus politik pilpres 2019, orientasi politik dari kedua kekuatan politik ini berada antara kubu yang berbeda dan secara resmi berkoalisi dengan masing-masing calon presiden. Hal tersebut menggambarkan bahwa, realitas kekuatan dukungan dari kedua organisasi ini jelas berbeda sehingga hal inipun juga mempengaruhi asumsi masyarakat luas untuk memberikan dukungan politiknya.

Sebab diketahui bahwa, NU maupun Muhammadiyah sangat kental pengaruh sosialnya di masyarakat luas, dua organisasi ini memiliki pengikut yang berasal dari berbagai latar belakang. Jumlah pengikutnya baik secara struktural maupun kultural sangat banyak maka tidak salah jika kedua organisasi ini memiliki kekuatan politik tersendiri. Selain itu, kekuatan-kekuatan lembaga ini terbilang sangat konstruktif untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan, misalnya dari segi pendidikan, kedua lembaga besar ini mempunyai banyak fasilitas seperti sekolah-sekolah, pesantren bahkan perguruan tinggi yang mempunyai jumlah didikan yang sangat banyak, dan begitupun dalam dimensi kemasyarakatan lainnya. Oleh karena atas dasar itu, kedua lembaga Islam ini mempunyai kekuatan dukungan yang terbilang sangat besar dan loyalitas yang tinggi.

Baik NU dan Muhammadiyah keduanya di kenal sebagai kekuatan yang merepresentasikan masyarakat Islam di Indonesia. Jangkauan pengaruh yang diberikan keduanya sangat luas dan berperan penting bagi masyarakat yang dapat di lihat dari langkah-langkah pergerakan NU dan Muhammadiyah dalam memajukan bangsa. Instrument yang dimiliki oleh kedua lembaga ini sangat

kompleks baik dari segi pendidikan, sosial, dan sebagainya mempunyai orientasi yang sangat jauh kedepan untuk memajukan negeri ini. Oleh karenanya, kedua organisasi ini mempunyai daya tarik yang besar untuk memikat pemilih pada Pilpres 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka sudah sewajarnya jika setiap warga negara memiliki hak politik. Dalam hal ini, setiap warga negara bebas untuk menentukan pilihan politiknya tanpa ada dorongan dari pihak lain. Namun, berbeda halnya dengan organisasi masyarakat. Ormas tidak dibenarkan untuk mendeklarasikan dirinya untuk mendukung salah satu calon atau partai tertentu.

Fenomena yang terjadi pada proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 yaitu adanya isu ketidaknetralan yang terjadi dalam sikap politik yang diambil oleh 2 (dua) organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah sementara yang diketahui kedua organisasi ini merupakan organisasi keagamaan dan tidak melibatkan dirinya dalam ranah politik praktis. Meskipun bergerak dalam bidang keagamaan, namun kedua organisasi ini memiliki kekuatan politik yang sangat besar dan berpengaruh di Indonesia dengan melihat jumlah penduduk yang ada mayoritas muslim, maka hal ini menjadi sangat penting untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi politik organisasi Muhammadiyah dan NU pada Pilpres 2019?
2. Kontribusi apa saja yang diberikan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU pada Pilpres 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan hal tersebut tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk melihat preferensi politik yang ditunjukkan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU pada pemilihan presiden 2019, meskipun kedua organisasi ini diidentikkan sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak berpolitik.
2. Untuk melihat seperti apa kontribusi yang diberikan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU dalam penyelenggaraan pemilihan presiden 2019 sehingga dapat dikatakan bahwa kedua organisasi ini memiliki kecenderungan pilihan politik di pemilihan presiden 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini hendak memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti lebih jauh dan

mendalam yang berkaitan dengan politik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah wawasan baru terkait dengan politik NU dan Muhammadiyah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan konsep dan teori yang menjadi dasar penelitian ini sehingga peneliti dapat memahami tema penulisan sesuai dengan landasan yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini juga mencakup karya penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan serta kerangka pikir yang digunakan untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dan semua hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Konsep Kekuatan Politik

Hannah Arendt mendefinisikan kekuatan sebagai sifat atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Pada hakekatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuatan yaitu:⁵

1. *Influence* atau pengaruh, yaitu bagaimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.
2. *Persuasif* yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi.
3. *Manipulasi* yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaruhi tidak menyadari.
4. *Coersion* yaitu ancaman atau paksaan dilakukan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan.
5. *Force* yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan.

⁵ Reike Diah Pitaloka. 2004. *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*. Jakarta. h. 60.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan politik dapat masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan.⁶ Pengertian yang bersifat individual artinya kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan kekuasaan dalam kehidupan politik. Aktor-aktor ini terdiri dari orang-orang yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Sedangkan secara kelembagaan artinya kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik.

Effendi Baktiar mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan politik adalah segala organisasi non politik yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif didalam dunia politik. Kekuatan politik menjadi dua sub bagian yaitu kekuatan politik formal dan kekuatan politik non-formal.⁷

1. Kekuatan-kekuatan politik formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik dan militer.
2. Kekuatan-kekuatan politik non-formal merupakan bagian dari bangunan *civil society*, misalnya: dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, pemimpin agama, kalangan cerdik (intelektual, lembaga-lembaga) dan media massa.

Kekuatan politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu kekuatan politik Islam. Dimana NU dan Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang memiliki kekuatan yang sangat besar didalam mempengaruhi kebijakan

⁶ Miriam Budiardjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta. h. 2.

⁷ Effendy Bakhtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta. h. 197.

pemerintah dengan melihat banyaknya jumlah massa yang menjadi anggota dari kedua organisasi tersebut. Kekuatan politik berbasis massa yang dinampakkan oleh kedua organisasi ini menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh masing-masing pasangan calon yang berkontestasi.

Jumlah anggota organisasi secara kultural yang begitu besar mampu dijadikan kekuatan politik yang utama. Selain itu, kekuatan politik yang dimiliki oleh kedua organisasi ini terdapat pula kekuatan individu yang dimiliki oleh para aktor-aktor yang berada pada lingkup organisasi tersebut yang bisa saja mempengaruhi kebijakan organisasi atau bahkan kebijakan pemerintah. Ikut terlibatnya aktor atau elit organisasi mampu memobilisasi massa yang lebih besar lagi sehingga kekuatan politik yang dimiliki oleh kedua organisasi ini semakin besar.

2.2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan organisasi yang dibentuk oleh sejumlah orang karena adanya kesamaan sikap, kepercayaan, dan/atau tujuan. Kelompok kepentingan diasosiasi manusia yang terorganisir, memiliki keanggotaan, pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi ke dalam maupun ke luar organisasi.

Kelompok kepentingan atau *interest group* seringkali didefenisikan sebagai, organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan. Sekalipun anggota dari kelompok kepentingan ini memenangkan kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang

menguasai pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan.⁸ Tujuan dari kelompok kepentingan ini hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok mereka dan memusatkan perhatian mereka pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah.

Kelompok kepentingan berbeda-beda dalam berbagai hal misalnya struktur, gaya, sumber pembiayaan, serta basis dukungannya. Meskipun kelompok kepentingan ini diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, serta agama, kelompok kepentingan yang paling kuat atau yang paling adalah kelompok yang sehari-hari dan karier seoranglah yang paling langsung dipengaruhi kebijaksanaan atau tindakan pemerintah. Menurut Gabriel A. Almond kelompok kepentingan terbagi beberapa jenis, yaitu:⁹

1. Kelompok *Anomic*, yaitu kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan, dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur. Kelompok ini sering tumpah tindih (*overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, kelompok anomic lebih memiliki terobosan ke dalam sistem politik yang berhubungan dengan isu-isu tertentu sehingga menciptakan demonstrasi

⁸ Lihat, Mohammad Maiwan. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), Kekuasaan dan Kedudukan dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* Volume 15, Nomor 2, April 2016. h. 76.

⁹ Gabriel A. Almond dan G.Bingham Powell, eds., *Comparative Politics Today: A World View* (New York: Harpes Collins, 1992), h. 62-65.

dan kerusuhan. Setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah, maka kelompok ini akan bubar dengan sendirinya.

2. Kelompok *Non Assosiasional*, yang termasuk didalam kategori kelompok ini yaitu kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir. Keanggotaan kelompok nonassosiasional biasanya berlatar belakang atau identitasnya yang sama, misalnya, kelompok keluarga, keturunan, etnik, dan pemimpin agama. Contoh kelompok ini Ikatan Masyarakat Bugis, Organisasi Daerah dan Alumni Pondok Pesantren.
3. Kelompok *Institusional*, yaitu kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta artikulasi kepentingan. Kelompok ini merupakan kelompok yang melembaga secara formal serta rutin melakukan kegiatan-kegiatan dan juga jaringan dan keanggotaan organisasi yang kuat. Contoh kelompok ini adalah organisasi NU, Muhammadiyah.
4. Kelompok *Assosiasional*, yaitu kelompok kepentingan yang terorganisir secara formal dengan keanggotaan yang resmi dan formal pula. Keanggotaan dari kelompok ini berasal dari satu profesi yang sama dengan tujuan mereka yang spesifik untuk mewakili kepentingan-kepentingan anggota mereka. Contoh kelompok ini Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan lain-lain.

Organisasi Muhammadiyah dan NU yang diidentikkan sebagai kelompok kepentingan institusional memiliki pengaruh sebagai kelompok yang terorganisir

dan sistematis yang mana kelompok tersebut senantiasa memiliki tujuan secara kolektif untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang dijalankan.

Muhammadiyah dan NU memposisikan dirinya sebagai organisasi yang tidak berpolitik praktis meskipun begitu peran kedua organisasi ini dalam sistem perpolitikan Indonesia begitu kuat. Menyadari hal itu, Muhammadiyah dan NU selalu berhati-hati jika dihadapkan dengan dinamika politik yang berkembang dengan status mereka sebagai organisasi keagamaan yang tidak berpolitik. Namun, kedua organisasi ini dapat memainkan fungsi politik mereka melalui amal usaha yang mereka miliki seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat.

Peran yang dilakukan oleh kedua organisasi ini melalui amal usaha mereka sedikit banyak mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, Muhammadiyah dan NU hadir untuk membantu perwujudan tujuan Negara melalui amal usaha mereka. Dengan ikut andilnya Muhammadiyah dan NU, hal ini dapat menjadi jalan kedua organisasi untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka dalam kebijakan pemerintahan.

Organisasi Muhammadiyah dan NU sebagai kelompok kepentingan menempatkan beberapa kadernya untuk berpartisipasi dalam proses politik sehingga kader mereka dapat terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Seperti yang terjadi pada pemilihan presiden 2019, terdapat kader organisasi yang secara langsung ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan banyak kader lainnya yang telah berafiliasi kedalam partai politik sebelumnya ikut

kedalam tim pemenangan masing-masing paslon dengan tujuan untuk memobilisasi massa.

Penyampaian aspirasi organisasi Muhammadiyah dan NU dalam menanggapi dinamika politik yang terjadi khususnya pada pilpres 2019, dilakukan oleh kader organisasi yang tersebar di berbagai partai politik, selain itu ada juga yang disampaikan secara langsung kepada pemerintah yang biasanya menggunakan media massa sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat umum agar pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan isu yang diinginkan oleh organisasi sebagai kelompok kepentingan.

2.3. Konsep Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih atau *voting behavior* menurut Jack C Plano yaitu suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.¹⁰

Budiarjo mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota partai dan sebagainya.

¹⁰ Plano. 1985

Perilaku pemilih dapat dilihat berdasarkan tiga pendekatan yang ada yaitu *The Columbia Study*, *The Michigan Model*, dan *Rational Choice*¹¹. Ketiga model perilaku pemilih ini biasa dikenal dengan istilah sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Penjabaran dari ketiga pendekatan ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, pendekatan sosiologis pertama kali dikembangkan oleh Columbia's University Bureau of Applied Social Science. Dalam pendekatan ini, perilaku memilih individu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis seperti kelas sosial, agama, etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, dan lain-lain.

Perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis ini melihat bahwa setiap manusia terikat dalam berbagai lingkaran sosial, asumsinya bahwa seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu seperti status sosial, ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya yang akan mempengaruhi keputusan pemilih. Keputusan pilihan ini disebabkan adanya control dan tekanan sosial individu.

Kedua, pendekatan psikologis atau *The Michigan Model* lebih menekankan faktor psikologis seseorang mampu menentukan perilaku politik mereka. Adanya keterikatan atau dorongan psikologis yang akan membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis tersebut disebabkan karena adanya perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat.

Seseorang menentukan pilihan politik berdasarkan dengan pendekatan psikologis dapat dilihat mereka lebih menekankan kepada faktor variable

¹¹ Bartels.2012.

psikologis sebagai telaah utama seperti ikatan emosional terhadap suatu partai politik (identitas partai), orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap kandidat.

Faktor psikologis yang mampu mendorong pemilih dalam menentukan pilihannya menurut Efriza ada beberapa faktor, yaitu identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik ini sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis. Kedua, orientasi kandidat dapat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat. Indikator yang dipakai oleh seorang pemilih dalam menilai kandidat diantaranya kualitas, kompetensi dan integrasi kandidat. Ketiga, orientasi isu/tema seorang individu menentukan pilihan mereka dengan melihat isu-isu yang berkembang.

Ketiga, pendekatan pilihan rasional ini muncul akibat adanya kritik dari kedua pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Terdapat kegelisahan ilmuwan yang melihat perubahan-perubahan perilaku pemilih yang tidak dapat dijelaskan oleh kedua pendekatan tersebut. Latar belakang teoritis dari pendekatan pilihan rasional berangkat dari teori ekonomi.

Downs dalam karyanya "*An Economic Theory of Democracy*" dan Riker and Ordeshock "*A Theory of the Calculus Voting*", kedua tokoh ini mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu

didasari atas perhitungan keuntungan atau apa yang diperolehnya jika mereka menentukan pilihan politik. Pilihan politik dengan pendekatan ini didasari oleh pilihan yang bersifat rasional, yaitu dipandu oleh kepentingan diri sendiri dan diberlakukan sesuai dengan prinsip maksimalisasi manfaat.

Ada juga beberapa pendekatan yang dikembangkan oleh Lau dan Redlawsk yaitu *rational choice*, *early socialization*, *fast and frugal*, dan *bounded rationality*. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, berbagai model perilaku pemilih tidak harus bertentangan, semua model memiliki pengaruh terhadap pilihan politik.

2.4. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlatipah Nasir dengan judul “Kyai dan Islam dalam mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya”, fokus kajiannya terdapat pada Kyai sebagai pemimpin keagamaan dan juga tokoh masyarakat yang dianggap memiliki karisma sehingga mampu mempengaruhi perilaku pemilih terutama di kalangan santri. Hal yang sama juga akan dilakukan didalam penelitian ini, dengan melihat Kyai dalam hal ini orang yang dituakan ataupun yang dihormati dan aktor-aktor yang terdapat didalam NU dan Muhammadiyah apakah juga mampu memiliki pengaruh besar didalam penentuan sikap pilihan politik pada Pilpres 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Indah Prameswari dengan judul “Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya relasi yang ditunjukkan oleh salah satu organisasi dan salah satu kandidat pada Pilgub Bali

2013 didasari dengan adanya kepentingan yang dimiliki oleh keduanya, yang menyebabkan organisasi tidak lagi sesuai dengan visi misinya yaitu netral dalam politik. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh peneliti, salah satu hal yang nantinya akan dikaji yaitu apakah kepentingan yang dimiliki individu maupun organisasi NU dan Muhammadiyah menjadi alasan kedua organisasi ini dalam menentukan sikap politik mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Nuzula dengan judul “Politik Elit Nahdlatul Ulama (NU): Pemihakan dalam Pilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014”. Fokus kajiannya terdapat pada elit NU yang berbeda dalam keterpilihan mereka pada kandidat pilpres 2014, sedangkan dalam penelitian ini fokus kajian yang akan dilakukan yaitu kecenderungan sikap politik organisasi NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang memiliki kekuatan politik. Kecenderungan sikap politik ini ditunjukkan pada pilpres 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh David Efendi dengan judul “Fragmentasi Politik Muhammadiyah: Studi Tentang Elite Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden Tahun 2009” fokus kajian dalam penelitian sebelumnya ini terdapat pada fragmentasi politik Muhammadiyah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan jangkauannya lebih luas yaitu fragmentasi kekuatan politik Islam yang berfokus pada organisasi NU dan Muhammadiyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto dengan judul “Politik dalam Organisasi (Suatu Tinjauan Menuju Etika Berpolitik)” dengan hasil yang menunjukkan bahwa dalam organisasi selalu terdapat fenomena politik yang melibatkan kepentingan, kekuasaan dan pengaruh. Setiap aktor didalam organisasi

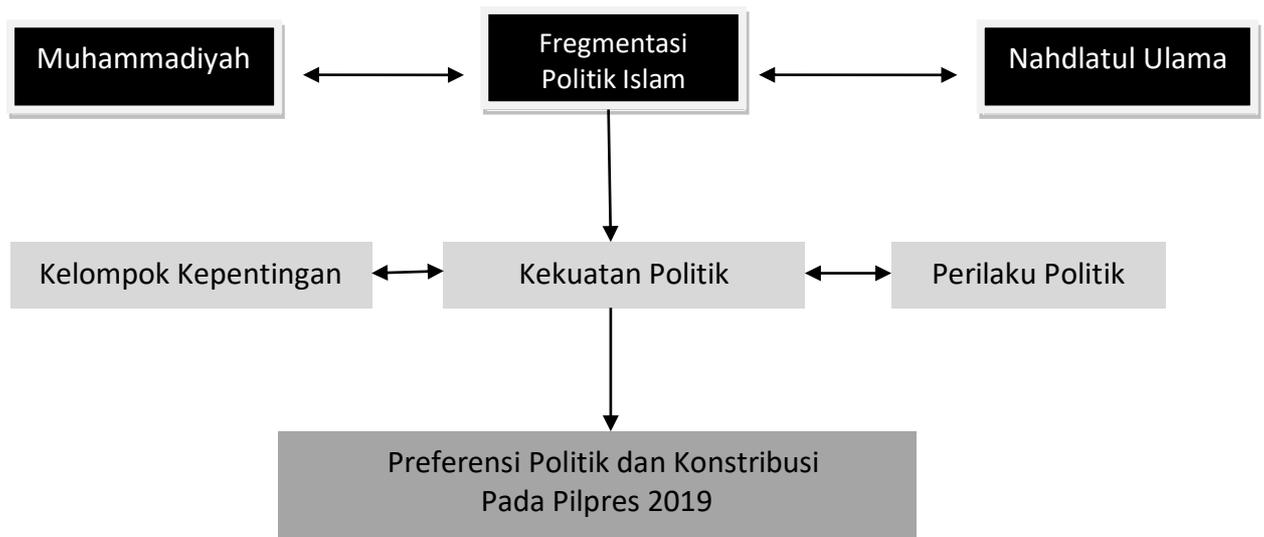
akan saling memainkan sumber kekuasaannya untuk mempengaruhi aktor lainnya harus tetap dalam kerangka etika berorganisasi. Sejalan dengan hal tersebut, pada penelitian yang akan dilakukan juga ingin meneliti bagaimana aktor memainkan sumber kekuasaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Nurjaman dengan judul “Cleavage Agama di Tingkat Lokal, Indonesia: Identifikasi Partai tanpa Komitmen Electoral” dengan menunjukkan hasil bahwa NU dan Muhammadiyah tidak lagi mendukung PKB dan PAN serta satri sebagai pemilih lebih pragmatis dan fleksibel dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam penelitian ini, berdasarkan hipotesa awal dalam penelitian ini justru melihat hal yang berbeda terkait dengan kepentingan politik NU dan Muhammadiyah dimana kedua organisasi ini tidak terlepas dari kepentingan PKB dan PAN. Serta pilihan politik para santri tidak terlepas dari pilihan politik pimpinan atau Kyai NU dan Muhammadiyah yang memiliki pengaruh yang sangat besar.

2.5. Definisi Operasional

Institusi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Didalam ranah Pemilihan Presiden Tahun 2019, kedua organisasi ini memiliki bagian penting yang akan diteliti lebih dalam yaitu alasan kedua organisasi ini memiliki kecenderungan pilihan calon presiden yang berbeda sedangkan yang diketahui mereka sama-sama merupakan organisasi Islam yang dilandaskan oleh Al-Qur’an dan Hadist.

Berikut ini adalah gambaran dari kerangka berpikir yang dibentuk oleh peneliti.



a. Fragmentasi

Fragmentasi dalam penelitian ini diartikan sebagai sebuah situasi dimana adanya pembeda kekuatan politik secara horizontal antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Fragmentasi dapat diartikan sebagai keberagaman atau perpecahan dalam sikap politik atau pilihan politik kedua organisasi Islam tersebut dalam menghadapi pilpres 2019.

Terfragmentasinya pilihan politik organisasi Muhammadiyah dan NU terhadap pilihan politik di pemilihan presiden 2019 mempunyai interpretasi sesuai persepsi masing-masing kader terhadap pasangan calon tersebut. Tidak adanya ketegasan yang diciptakan oleh organisasi terkait politik menjadikan pilihan

politik kader yang beragam, sehingga kecenderungan pilihan politik masing-masing kader Muhammadiyah dan NU menjadi terfragmentasi atau beragam. Oleh karena pilihan politik yang didasari pilihan rasional masing-masing kader organisasi, maka bukan tidak mungkin jika fragmentasi pilihan politik juga dapat terjadi di internal organisasi baik di Muhammadiyah maupun di NU.

b. Kekuatan Politik Islam

Islam dan Indonesia tidak dapat terpisahkan dengan melihat penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dapat menjadikan kekuatan Islam di Indonesia tidak bisa diremehkan. Nilai ketuhanan menjadi dasar spiritual, dan aspek kemanusiaan seperti kebersamaan menjadi kekuatan yang memikat masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain jumlahnya yang begitu besar, nilai-nilai inilah yang menjadikan Islam memiliki kekuatan tersendiri dalam dunia politik.

Kekuatan politik Islam yang di Indonesia menjadi kekuatan yang sangat besar sehingga masyarakat muslim dianggap sebagai kunci kemenangan dari calon pemimpin yang mengikuti kontestasi politik pada setiap pemilihan umum. Seperti yang terjadi pada pemilihan presiden 2019, melihat jumlah pengikut organisasi Muhammadiyah dan NU baik secara struktural maupun kultural yang begitu banyak serta kekuatan yang terbilang sangat konstruktif untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Pemilihan presiden 2019 menjadikan Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam perolehan dukungan untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jumlah massa dan nilai-nilai moral

yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan NU menjadi kekuatan politik tersendiri pada kontestasi politik pilpres.

c. Sikap Politik

Sikap politik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perbuatan atau tindakan yang diambil oleh organisasi Muhammadiyah dan NU dalam menanggapi situasi politik. Sikap memiliki sifat yang cenderung berubah-ubah sesuai dengan berubahnya keadaan dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam motif tergantung dari kondisi atau peristiwa yang melatarbelakangi. Sikap politik NU dan MU juga dapat diketahui dengan melihat kontribusi yang diberikan oleh keduanya dalam upaya menyukseskan pilpres 2019 lalu.

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan dalam rangka membantu dan menghasilkan sesuatu. Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu keikutsertaan individu maupun kelompok organisasi dalam hal ini Muhammadiyah dan NU, terlibat secara aktif dalam kontestasi pemilu 2019. Kontribusi yang diberikan oleh kedua organisasi ini mampu menunjukkan arah orientasi politik atau kecenderungan politik yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah dan NU.